

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 315 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Dayeuhkolot untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Dayeuhkolot untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

## BAB II
## RUANG LINGKUP
## RENSTRA KECAMATAN DAYEUHKOLOT

### Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dayeuhkolot untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dayeuhkolot yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Dayeuhkolot yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dayeuhkolot dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Dayeuhkolot dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Dayeuhkolot;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Dayeuhkolot.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN DAYEUHKOLOT

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Dayeuhkolot dalam menyusun Renja Kecamatan Dayeuhkolot.

(2) Renstra Kecamatan Dayeuhkolot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
      1. latar Belakang;
      2. dasar hukum penyusunan;
      3. maksud dan tujuan; dan
      4. sistematika penulisan.
   b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Dayeuhkolot paling sedikit memuat:
      1. gambaran pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot; dan
      2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Dayeuhkolot.
   c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
      1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029;
      2. strategi Kecamatan Dayeuhkolot dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
      3. arah kebijakan Kecamatan Dayeuhkolot dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
   d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
      1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
      2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
      3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Dayeuhkolot; dan

4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN DAYEUHKOLOT

### Pasal 5

(1) Kecamatan Dayeuhkolot melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Dayeuhkolot sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Dayeuhkolot terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Dayeuhkolot.

(3) Camat Dayeuhkolot menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DAYEUHKOLOT

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Dayeuhkolot, maka Renstra Kecamatan Dayeuhkolot dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Dayeuhkolot.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 315

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 315 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
DAYEUHKOLOT TAHUN 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

## BAB I
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

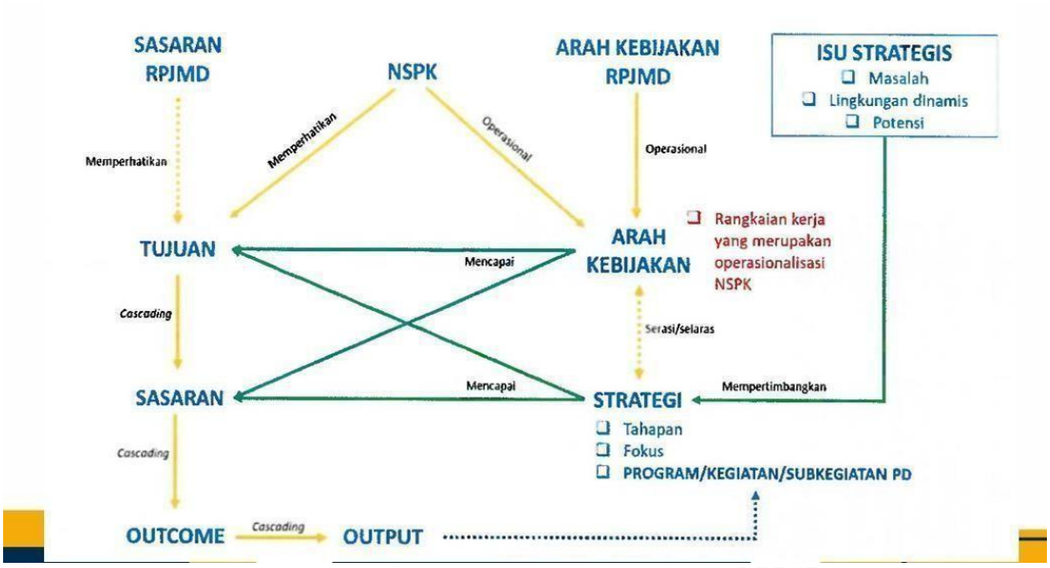
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah dimaksud didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029 akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Renja Kecamatan Dayeuhkolot sebagai penjabaran dokumen tahunannya. Kecamatan Dayeuhkolot berpedoman pada Visi Misi RPJMD Kabupaten Bandung menetapkan Indikator Kinerja Utamanya sebagai berikut:

Tujuan :1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

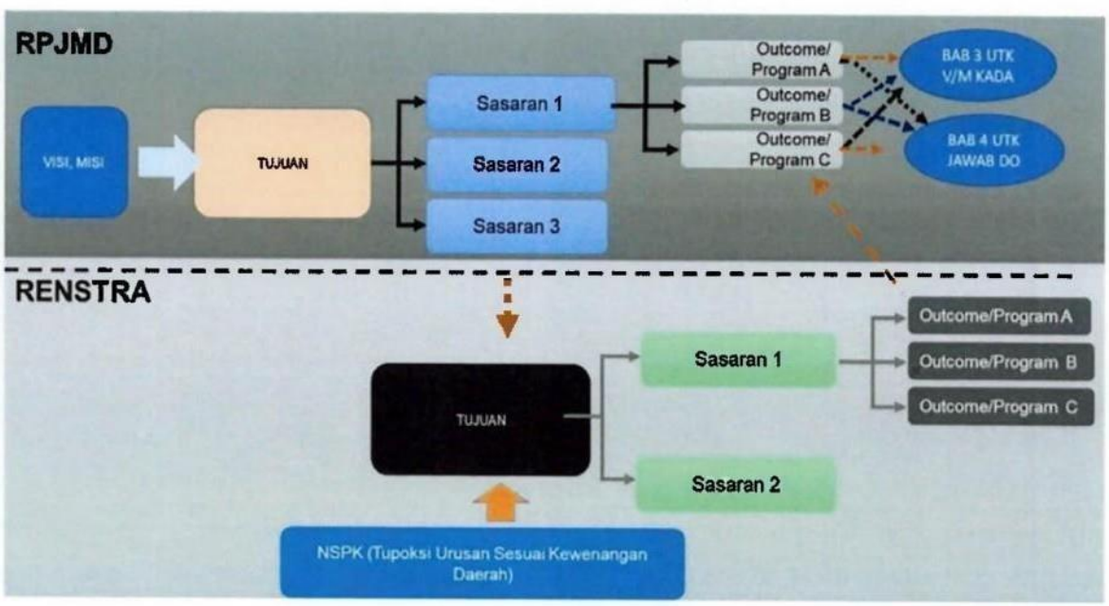
Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Gambar 1.1 Konsep Renstra PD




Sumber gambar : LPPSP SEMARANG (https://bappeda.salatiga.go.id/rpjmd25/Renstra-PD-menurut-Inmendagri-2-2025.pdf)

Gambar 1.2 Kerangka Keterkaiatan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD




Sumber gambar: LPPSP SEMARANG (https://bappeda.salatiga.go.id/rpjmd25/Renstra-PD-menurut- Inmendagri-2-2025.pdf)

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, landasan hukum tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Visi, Misi, Tujuan, dan berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung

### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.
2. Sebagai Landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan dan Kelurahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
5. Menjadi pedoman bagi penyusunan rencana Kerja kecamatan Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunannya adalah sebagai berikut :

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

# BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Dayeuhkolot

Memuat uraian mengenai dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mencakup Sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG’s atau

indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Lapangan

Bagian ini memuat identifikasi dan deskripsi kelompok yang menjadi penerima manfaat utama dari program dan kegiatan yang direncanakan.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Dayeuhkolot

BAB III TUJUAN SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dasar Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Dayeuhkolot; dan;

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

# BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan;

5.2. Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN DAYEUHKOLOT

## 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

Dalam kedudukan dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

### 2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Kecamatan Dayeuhkolot

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya,
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Dayeuhkolot berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Sosial Budaya;
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Jabatan Fungsional
9. Kelurahan, terdiri atas:

   Kelurahan terdiri dari :

   a. Lurah;

   b. Sekretariat Kelurahan;

   c. Seksi Pemerintahan;

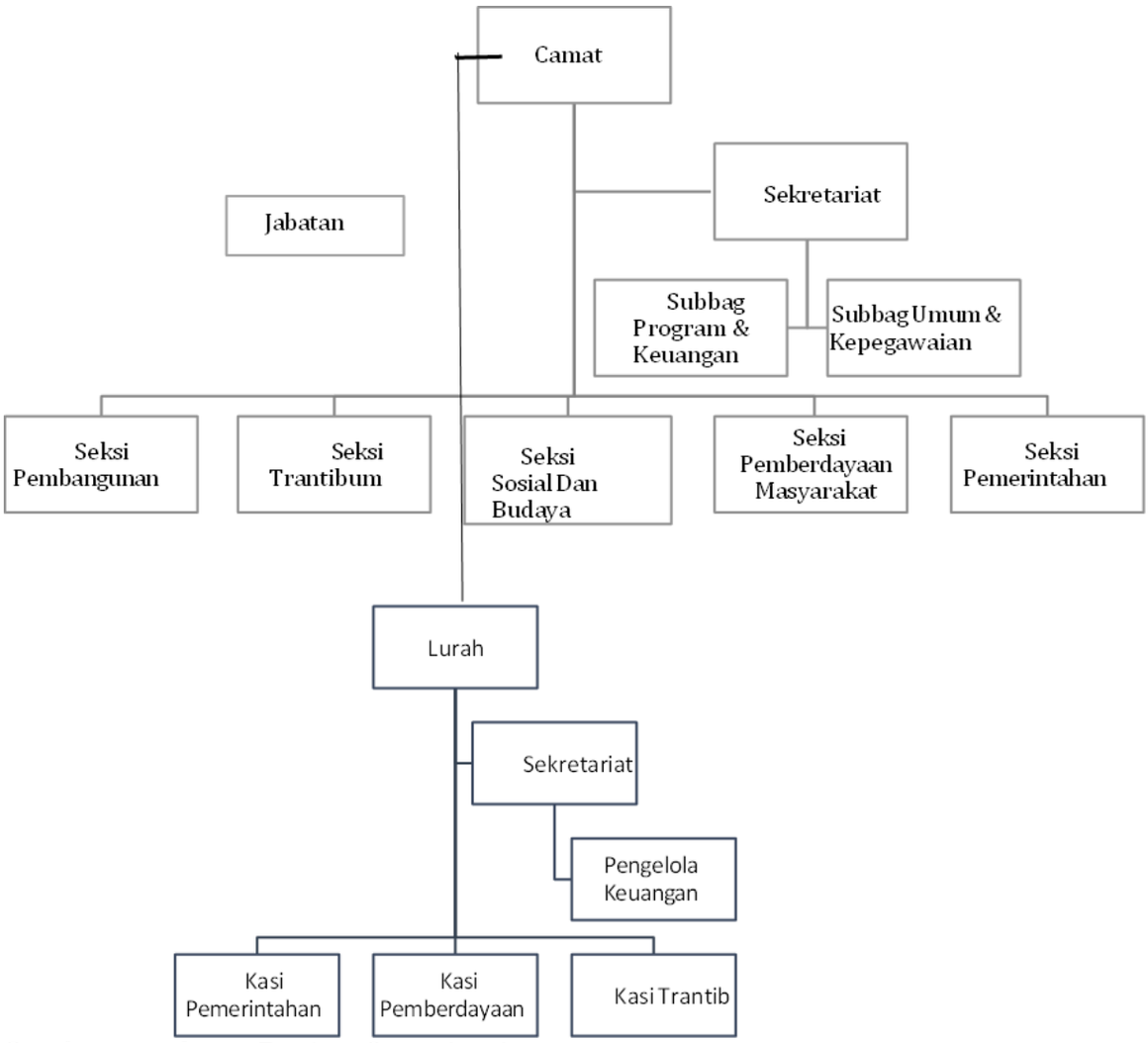
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

   e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

   f. Jabatan Fungsional

Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui struktur organisasi Kecamatan Dayeuhkolot sebagai berikut :

Gambar. 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan




Sumber gambar : Bagian Organisasi

1. Sekretariat Kecamatan

   Camat membawahkan seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
   c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

e. Penyelenggaraan dan mengkoordinasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Program dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian, dimana kedua subbagian tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

2. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan administrasi keuangan. Dan dalam melaksanakan tugas pokok d i m a k s u d Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
   b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
   c. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
   d. penyusunan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi danpertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
   f. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
   g. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
   h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
   b. pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
   c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
   d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
   e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya..
4. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
   b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
   c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dansinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
7. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

operasional Seksi Pembangunan;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

8. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
   b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
   c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

9. Lurah mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
   b. pelaksanaan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat;
   c. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
   e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

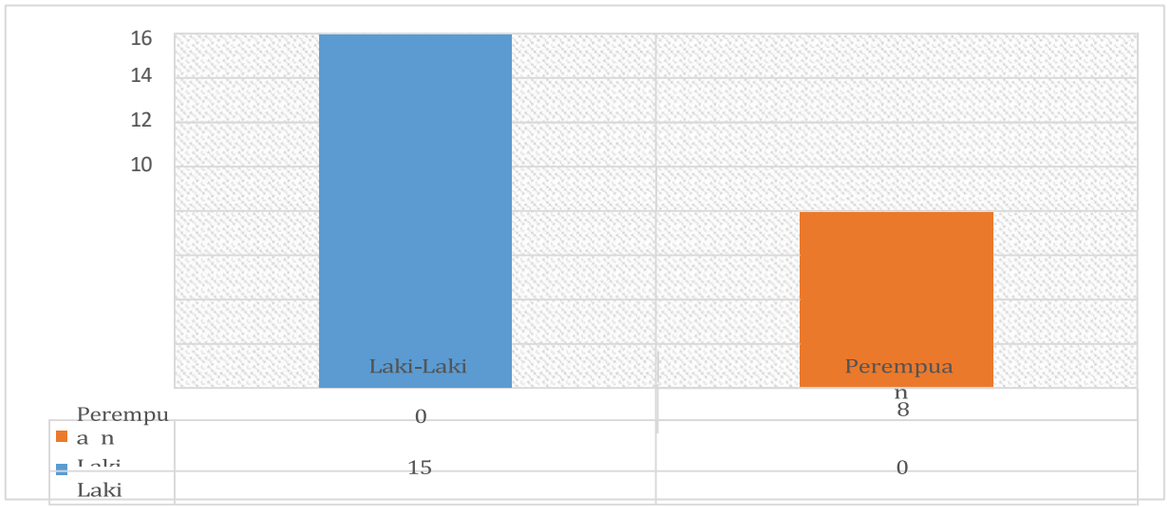
2.1.2 Sumber daya manusia Kecamatan Dayeuhkolot

a. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung memiliki pegawai PNS sebanyak 23 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, merupakan pegawai di Kecamatan 18 orang dan Kelurahan 5 orang, dan bisa dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa pegawai Kecamatan Dayeuhkolot didominasi oleh laki-laki sebanyak 26 orang atau sekitar 56,94 % dibandingkan dengan perempuan sebanyak 7 orang atau sekitar 43,05 %. Kemudian komposisi tingkat pendidikan dan pangkat golongan dari pegawai di Kecamatan Dayeuhkolot dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Tingkat Pendidikan Sesuai Jenis Kelamin Tahun 2025

| No | Jenis Kelamin | S2 | S1 | D2 | SLTA | SLTP | SD | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Wanita | 1 | 5 | 0 | 1 | | 0 | 6 |
| Jumlah | | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai di Kecamatan Dayeuhkolot kebanyakan adalah S1 sebenyak 11 atau

sekitar 47,22%, lulusan SMA sebanyak 5 orang atau sekitar 47,22 %, S2 sebanyak 3 orang atau sekitar 20,83 %, SLTP 1 orang dan SD nihil. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa berdasarkan pendidikan pegawai Kecamatan Dayeuhkolot memiliki kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola proses perencanaan daerah di Kabupaten Bandung.

Tabel 2.3

Komposisi Golongan Sesuai Jenis Kelamin

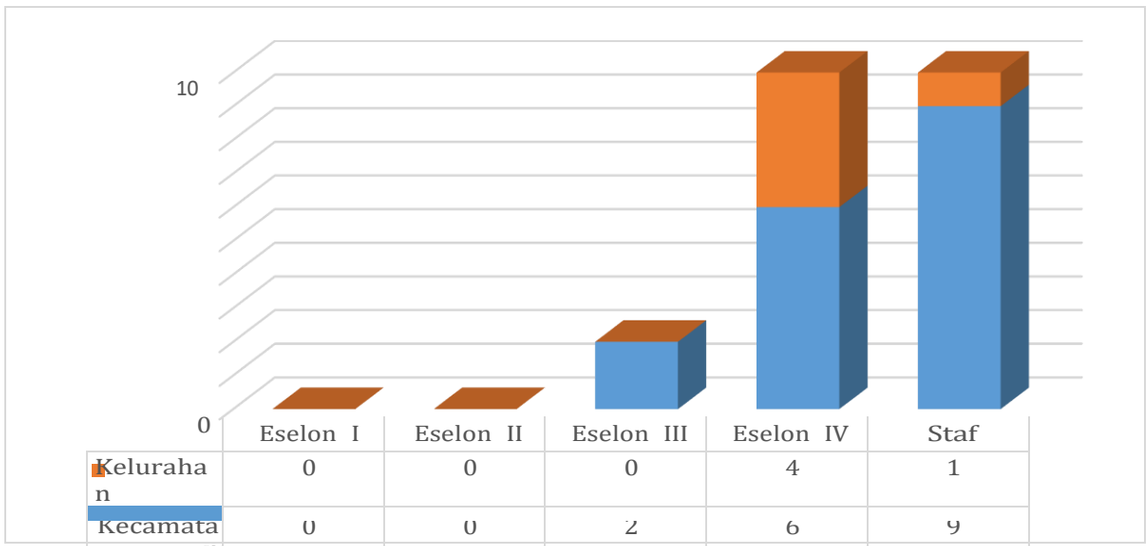
| No. | Uraian | Golongan | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | III | II | I | |
| 1 | Laki-Laki | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 |
| 2 | Perempuan | 1 | 5 | 2 | | 8 |
| | Jumlah | 3 | 11 | 7 | 1 | 23 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Melihat tabel di atas menunjukan bahwa komposisi golongan sesuai jenis kelamin menunjukan bahwa jenis kelamin laki-laki dengan golongan III dan II cenderung lebih dominan, hal tersebut menjadikan adanya keseimbangan dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing.

Tabel 2.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan




Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Bahwa bisa dilihat pada tabel di atas untuk eselon terdiri dari eselon III yang dimiliki oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan sedangkan

untuk eselon IV dimiliki oleh kepala seksi dan kepala subbagian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, kelurahan Pasawahan merupakan perangkat kecamatan Dayeuhkolot dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Pegawai Kelurahan Pasawahan

| No | Jabatan | Golongan |
|---|---|---|
| 1 | Lurah | Penata Tk. I, III/d |
| 2 | Sekretaris Kelurahan | Penata Tk. I, III/d |
| 3 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Penata Tk. I, III/a |
| 4 | Seksi Pemerintahan Kelurahan | Penata, III/c |
| 5 | Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Penata Muda Tk. I, III/b |
| 6 | Pengelola Keuangan | Pengatur, II/c |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan

b. Sarana Dan Prasarana

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Dayeuhkolot dengan keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Administrasi maupun operasional yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Saldo Akhir Berdasarkan Jenis Aset

| N O. | JENIS ASET | SALDO AKHIR PER 31 Desember 2024 | AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31 Desember 2024 | NILAI BUKU PER 31 Desember 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 2.006.475.000 | - | 2.006.475.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 3.797.668.488 | 3.325.073.659 | 472.594.829,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 6.226.854.596 | 1.006.213.969 | 5.220.640.627 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 78.256.000 | 43.679.033 | 34.576.967 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 23.350.000 | - | 23.350.000 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Total Aset Tetap | 12.132.604.084 | 4.374.966.661 | 7.757.637.423 |
| 7 | Aset Tak Berwujud | | | - |
| 8 | Aset Lain-Lain/Rusak Berat | 1.024.804.194 | 945.844.755 | 78.959.439 |
| 9 | Aset yang dimanfaatkan pihak Lain | | | - |
| | Total Aset Lainnya | 1.024.804.194 | 945.844.755 | 78.959.439 |
| | Total Aset Tetap + Aset Lainnya | 13.157.408.278 | 5.320.811.416 | 7.836.596.862 |

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Tabel. 2.7

Sarana Dan Prasarana Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025

| NO | Nama Barang | Merk / Model | Bahan | Tahun Pembelian | Kode Barang | Jumlah Barang | Harga Perolehan | Keadaan Barang | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat | |
| 1 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Lokal | Kayu | 2019 | 001 | 1 | 20.000.000 | v | | | |
| 2 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 008 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 3 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 009 - 010 | 2 | 939.950 | v | | | |
| 4 | Sofa | Lokal | Besi | 2021 | 007 | 1 | 7.224.800 | v | | | |
| 5 | Sofa | Lokal | Besi | 2018 | 004 | 1 | 7.500.000 | v | | | |
| 6 | AC Split | Daikin | Plastik | 2017 | 010 | 1 | 10.000.000 | v | | | |
| 7 | Komputer Pc | Hp Aio 205 | Plastik | 2021 | 030 | 1 | 11.000.000 | v | | | |
| 8 | Meja Kerja Pejabat | Lokal | Kayu | 2021 | 007 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 9 | Meja Kerja Kayu | Lokal | Kayu | 2021 | 027 | 1 | 5.785.560 | v | | | |
| 10 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 007 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 11 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 008 | 1 | 939.950 | v | | | |
| 12 | Sofa | Lokal | Besi | 2021 | 006 | 1 | 7.224.800 | v | | | |
| 13 | AC Split | LG | Plastik | 2017 | 008 | 1 | 10.000.000 | v | | | |

| NO | Nama Barang | Merk / Model | Bahan | Tahun Pembelian | Kode Barang | Jumlah Barang | Harga Perolehan | Keadaan Barang | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat | |
| 14 | Filing Cabinet Besi | Avesta | Besi | 2016 | 012 | 1 | 2.825.000 | v | | | |
| 15 | Meja Rapat | Lokal | Kayu | 2021 | 004 | 1 | 11.750.250 | v | | | |
| 16 | Kursi Rapat | Lokal | Besi | 2021 | 110 - 112 | 8 | 7.200.000 | v | | | |
| 17 | Televisis | Toshiba | Plastik | 2021 | 004 | 1 | 11.000.000 | v | | | |
| 18 | Kursi Rapat | New Star | Besi | 2014 | 001 - 010 | 10 | 347.600 | v | | | |
| 19 | AC Split | Best Life | Plastik | 2016 | 006 | 1 | 4.990.700 | v | | | |
| 20 | Meja Kerja Pejabat | Lokal | Kayu | 2021 | 006 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 21 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 006 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 22 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 007 | 1 | 939.950 | v | | | |
| 23 | Filing Cabinet Besi | Brother | Besi | 2008 | 005 | 1 | 750.000 | v | | | |
| 24 | Meja Kerja Pejabat | Lokal | Kayu | 2021 | 005 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 25 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 005 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 26 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 006 | 1 | 939.950 | v | | | |
| 27 | Filing Cabinet Besi | Brother | Besi | 2007 | 003 | 1 | 750.000 | v | | | |
| 28 | Meja Kerja Pejabat | Lokal | Kayu | 2021 | 004 | 1 | 1.619.970 | v | | | |

| NO | Nama Barang | Merk / Model | Bahan | Tahun Pembelian | Kode Barang | Jumlah Barang | Harga Perolehan | Keadaan Barang | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat | |
| 29 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 004 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 30 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 005 | 1 | 939.950 | v | | | |
| 31 | Filing Cabinet Besi | Brother | Besi | 2008 | 004 | 1 | 750.000 | v | | | |
| 32 | Meja Kerja Pejabat | Lokal | Kayu | 2021 | 003 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 33 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 003 | 1 | 1.619.970 | v | | | |
| 34 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 003 - 004 | 2 | 939.950 | v | | | |
| 35 | Filing Cabinet Besi | Brother | Besi | 2008 | 003 | 1 | 750.000 | v | | | |
| 36 | Lemari Kaca | Lokal | Kayu | 2021 | 002 - 003 | 2 | 7.475.050 | v | | | |
| 37 | Meja Kerja Kayu | Lokal | Kayu | 2021 | 025 - 026 | 2 | 5.785.560 | v | | | |
| 38 | Meja Komputer | Lokal | Kayu | 2021 | 008 - 010 | 3 | 1.795.420 | v | | | |
| 39 | Meja Kerja Pejabat | Lokal | Kayu | 2021 | 001 - 002 | 2 | 1.619.970 | v | | | |
| 40 | Meja Kerja Kayu | Lokal | Kayu | 2017 | 017 | 1 | 2.311.000 | v | | | |
| 41 | Kursi Kerja Pejabat | Lokal | Besi | 2021 | 001 - 002 | 2 | 1.619.970 | v | | | |
| 42 | Kursi Kerja Non Struktural | Lokal | Besi | 2021 | 001 - 002 | 2 | 939.950 | v | | | |

| NO | Nama Barang | Merk / Model | Bahan | Tahun Pembelian | Kode Barang | Jumlah Barang | Harga Perolehan | Keadaan Barang | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat | |
| 43 | Kursi Kerja Putar | Lokal | Besi | 2016 | 001 - 002 | 2 | 1.542.200 | v | | | |
| 44 | Komputer Pc | hp C22-865 | Plastik | 2019 | 026 | 1 | 10.000.000 | v | | | |
| 45 | Printer | Epson L565 | Plastik | 2016 | 012 | 1 | 4.450.000 | v | | | |
| 46 | Printer | Hp Smart Tank 615 | Plastik | 2021 | 021 - 022 | 2 | 5.668.250 | v | | | |
| 47 | Filing Cabinet Besi | Brother | Besi | 2007 | 002 | 1 | 750.000 | v | | | |
| 48 | Filing Cabinet Besi | Bostinco/Boscа | Besi | 2017 | 013 - 014 | 2 | 2.253.000 | v | | | |
| 49 | Filing Cabinet Besi | Avesta | Besi | 2016 | 011 | 1 | 2.825.000 | v | | | |
| 50 | Filing Cabinet Besi | Lion | Besi | 2018 | 017 | 1 | 3.500.000 | v | | | |

Sumber : KIB B Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025

Berdasarkan data di atas sebagian besar perlengkapan/aset di Kantor Kecamatan Dayeuhkolot dalam kondisi baik.

### 2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

di Kecamatan Dayeuhkolot dapat dilihat atau dicermati dalam

Renstra periode sebelumnya (periode tahun 2021–2026) dimana Kecamatan Dayeuhkolot telah melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator dan target yang harus dicapai.

2.1.3.1 Data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Dayeuhkolot.

Kecamatan Dayeuhkolot adalah salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan, 15 Dusun, 87 RW dan 442 RT.

Adapun batasan- batasan wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:

2.1 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Bandung

2.2 Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Baleendah

2.3 Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang

2.4 Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kecamatan Margahayu

Tabel 2.8

Kondisi geografis daerah menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

| Desa/Kelurahan | Luas[1] Total Area[1] | Persentase terhadap Luas Kecamatan | Tinggi Wilayah | Jarak Ke Ibukota Kabupaten |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) |
| Cangkuang Kulon | 2,14 | 19,85 | 689,00 | 13,00 |
| Cangkuang Wetan | 2,10 | 19,48 | 686,00 | 14,00 |
| Pasawahan | 1,92 | 17,81 | 690,00 | 16,00 |
| Dayeuhkolot | 0,97 | 9,00 | 690,00 | 17,00 |
| Citeureup | 2,50 | 23,19 | 686,00 | 17,00 |
| Sukapura | 1,15 | 10,67 | 694,00 | 19,00 |

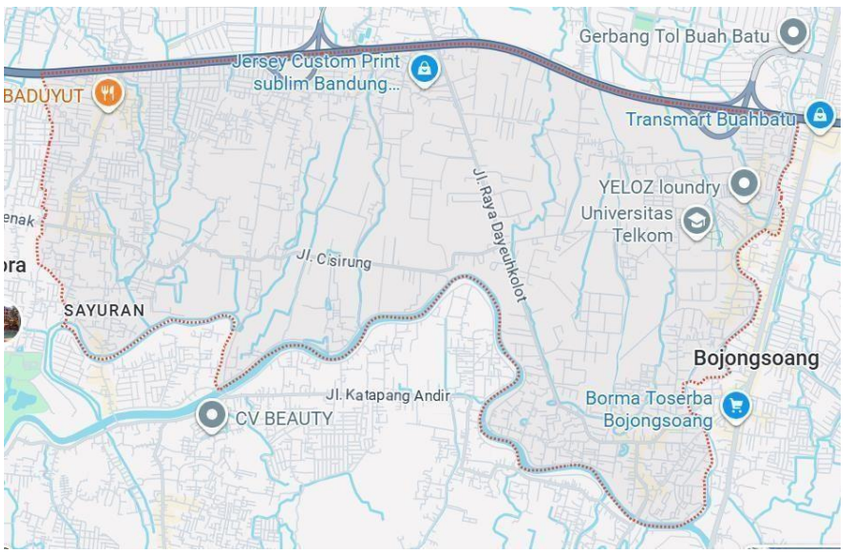
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kecamatan Dayeuhkolot mempunyai ketinggian 600 m di atas permukaan laut ( dpl ) bertopografi datar dengan suhu maksimal 32 0 C dan suhu mininum 28 0 C Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.102 mm / Tahun adapun bentuk

wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:

- Datar sampai berombak : 100 %
- Berombak sampai berbukit : -
- Berbukit dapat bergunung

Gambar 2.2.
Peta Kecamatan




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dayeuhkolot merupakan daerah rawan banjir di Bandung. Bersama dengan Baleendah, kecamatan ini menjadi daerah siaga bila musim penghujan tiba. Kajian karakter DAS Citarum (2011) mendapatkan bahwa 94% (sekitar 879,8 ha) wilayah Dayeuhkolot berpotensi terkena banjir setiap tahun. Wilayah ini termasuk DAS Citarum bagian hulu.

Karena letak geografis Dayeuhkolot dan Baleendah yang berdekatan (bahkan berbatasan) dengan Kota Bandung, maka dapat dipastikan jalur transportasi dari/ke Kota Bandung yang padat pun terputus selama banjir dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal inilah yang menjadi masalah bersama pemerintah Kabupaten dan Kota Bandung.

b. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024.

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Kecamatan

Dayeuhkolot tahun 2021-2026. Pada periode Perubahan Renstra 2021-2026 Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator sasaran strategis. Berikut adalah tabel target, realisasi dan capaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cangkuang Tahun 2021-2024.

Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021-2026

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya akuntanbilitas pemerintah daerah | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik | Nilai AKIP | 70,00 | 65,66 | 71,00 | 76,05 | 72,00 | 78,50 |
| 2 | | | Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik | 90% | 96% | 90,05% | 96% | 90,07% | 91% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | IKM | 84 Nilai | 85,87 | 85 Nilai | 91,07 | 86 Nilai | 97,5 |
| 4 | | Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa | Persentase Desa Beradministrasi Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - |
| | | | Jumlah Desa Cepat Berkembang | - | - | - | - | 1 Desa | 1 Desa |

Sumber: Hasil analisis Kec. Dayeuhkolot, 2025

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, kemudian adanya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, terdapat perubahan pada indikator sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dimana sebelumnya Persentase desa beradministrasi baik menjadi Jumlah Desa Cepat Berkembang.

Secara umum, indikator yang ditetapkan selama periode tersebut telah menunjukkan capaian tinggi, bahkan konsisten mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021-2026. Terutama pada indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dayeuhkolot yaitu nilai IKM yang setiap tahunnya konsisten mengalami peningkatan. Adapun IKU Jumlah Desa Cepat Berkembang belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Berikut tingkat capaian kinerja program penunjang dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021-2026.

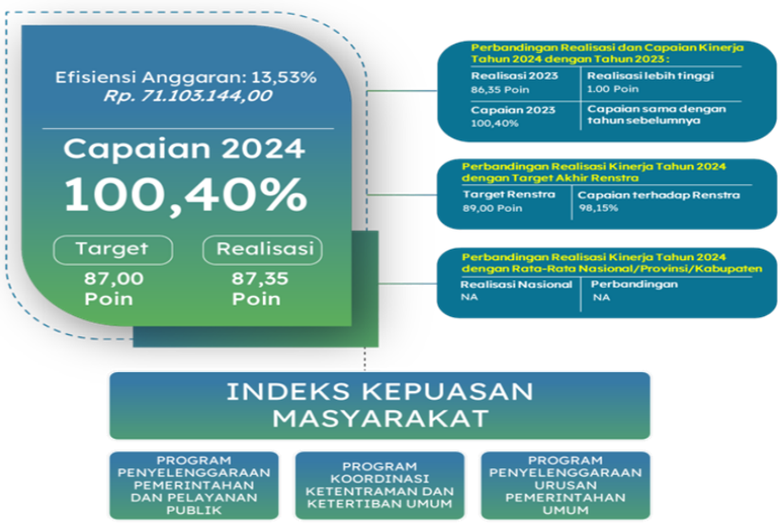
Tahun 2024 nilai IKM melampaui target yang ditetapkan disini menunjukan bahwa pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot terhadap masyarakat sangat baik dan bisa dilihat dari data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas

pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan

menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Kecamatan Dayeuhkolot telah melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis sekaligus Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dayeuhkolot yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan, hasil tersebut dapat dilihat pada infografis berikut:

Gambar 2.3.
Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan Dengan Standar Nasional.




Sumber : Lakip Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah terselenggara secara optimal. Hal tersebut terlihat baik dari realisasi nilai IKM Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024 terhadap target capaian IKM tahun 2024 maupun perbandingan dengan capaian tahun 2023 serta perbandingan realisasi IKM tahun 2024 dengan target akhir periode rencana strategis dan standar capaian IKM secara nasional. Untuk analisis lebih lanjut terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan

Dayeuhkolot, berikut ini merupakan penjelasan rinci atas capaian kinerja dimaksud

Gambar 2.4.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Nilai IKM Tahun 2024




Sumber : Lakip Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024

Gambar di atas menunjukan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Dayeuhkolot telah melampaui target. Hal tersebut diukur dari capaian nilai IKM Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2024 yang telah melampaui target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 yaitu senilai 91,10 Poin dari target senilai 76,20 poin dengan capaian persentase sebesar 103,02%. Penjelasan lebih lanjut atas capaian nilai IKM tahun 2024 tersaji pada table 3.2

Tabel 2.12.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai IKM Tahun 2024

| Tujuan | Sasaran Strategis | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan | 91,10 Poin | 91,71 Poin | 100,67% |

Sumber : Lakip Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024

Gambar 2.5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai IKM Tahun 2024 dengan Tahun 2023




| Perbandingan Realisasi Dan Capaian Nilai IKM Tahun 2024 dengan Tahun 2023 | |
|---|---|
| Realisasi 2023 91,06 poin | Realisasi lebih tinggi 6.00 poin |
| Capaian 2023 107,13% | Capaian sama dengan tahun sebelumnya |

Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

Gambar 2.5 menunjukan penjelasan mengenai perbandingan capaian nilai IKM dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Realisasi nilai IKM Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2024 mengalami peningkatan senilai 6,00 Poin. Namun pada aspek persentase capaian, Kecamatan Dayeuhkolot mengalami stagnansi atau tidak terjadi peningkatan. Tabel 2.10 merupakan sandingan realisasi dan capaian nilai IKM tahun 2024 dengan tahun 2023.

Tabel 2.13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai IKM
Tahun 2024

| Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | Deviasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | Tahun 2023 | Tahun 2024 | | |
| Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 107,13% | 107,13% | 0,00% | Tidak Terjadi Peningkatan |

Sumber : Lakip Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024

Gambar 2.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai IKM Tahun 2024
dengan Target Akhir pada Renstra 2021 – 2026




| Perbandingan Realisasi Nili IKM Tahun 2024 dengan Target Akhir Nilai IKM pada Renstra | |
|---|---|
| Target Renstra 94,00 poin | Capaian terhadap Renstra 94,41% |

Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

Gambar 2.6 menunjukan bahwa perbandingan

realisasi nilai IKM terhadap target akhir Renstra 2021

– 2026 sudah mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 94,00 poin. Adapun sandingan antara capaian nilai IKM tahun 2024 terhadap target akhir renstra disajikan pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.14.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Target Akhir Renstra

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | Capaian Tahun 2024 | Target Akhir Renstra | Deviasi |
|---|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) | 97,50 Poin | 107,13% | 94,00 Poin | 350% |

Sumber data: Laporan Hasil Survey Kepuasaan Masyarkat Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024

Target akhir renstra telah tercapai di tahun 2024 ini. Hal itu didasarkan para realisasi nilai IKM dari tahun awal periode renstra yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 selalu tercapai dengan target tahunan pada renstra. Gambar 2.7 adalah grafik perbandingan target dan realisasi IKM dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

Gambar 2.7.
Perbandingan realisasi nilai IKM tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026




Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

Gambar 2.8
Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2024
dengan Rata-rata Nilai IKM Nasional




| Perbandingan Realisasi Nili IKM Tahun 2024 dengan Rata-rata Nasional | |
|---|---|
| Realisasi Nasional nn | Capaian Kec. Dayeuhkolot 91,71poin |

Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

Pada gambar 2.8 menunjukan bahwa rata-rata nilai IKM belum dapat dibandingkan dengan capaian rata- rata nasional dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang.

Adapun meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2024 didukung dengan beberapa faktor yang tertera pada gambar 2.9 berikut:

Gambar 2.9
Faktor-Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2024




Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

a) Faktor pertama, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Dayeuhkolot dipengaruhi

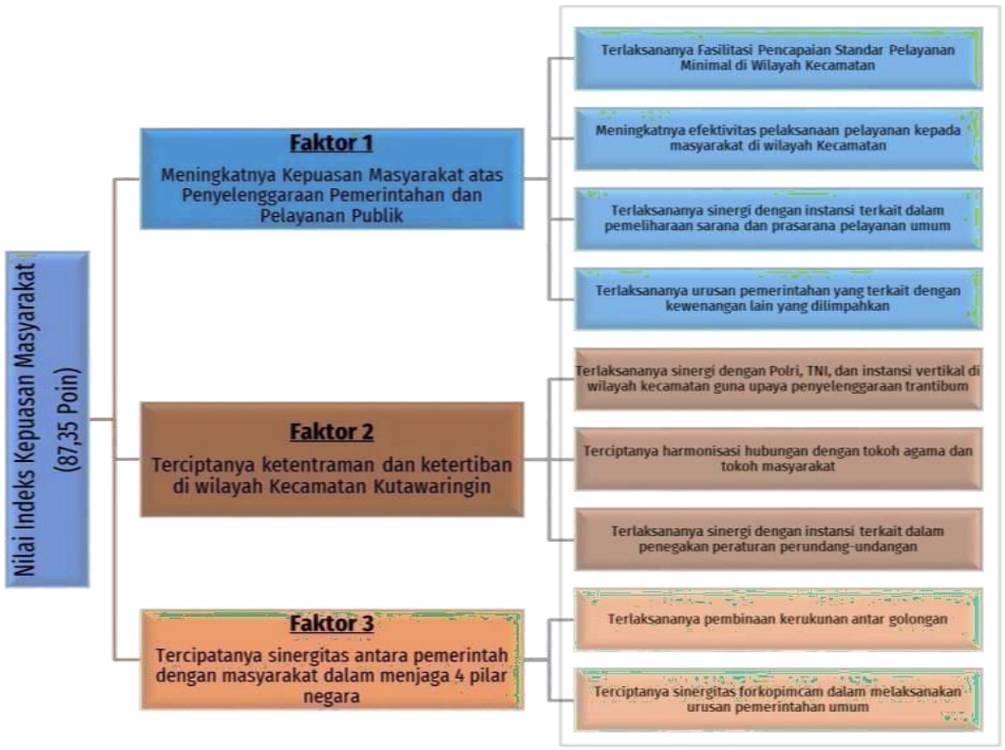
oleh terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja yang ada di Kecamatan, terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta terlaksananya optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

b) Faktor kedua, yaitu terciptanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakkan peraturan perundang- undangan tidak terlepas dari pengaruh sinergitas dan harmonisasi yang baik antara Kecamatan Dayeuhkolot dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum dan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang- undangan

c) Faktor ketiga, yaitu terciptanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam menjaga 4 (empat)pilar negara dipengaruhi oleh terlaksananya urusan pemerintahan umum yang ditugaskan Kepala Daerah kepada Kecamatan Dayeuhkolot.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan kinerja operasional yang mendukung terhadap program-progam yang dilaksanakan. Gambar3.8 menjelaskan secara rinci apa saja kinerja operasional yang mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 2.10
Kinerja Operasional Pendukung Keberhasilan
Capaia Kinerja Peningkatan Pelayanan Publik




Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

Berdasarkan analisis analisis diatas, dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka akselerasi kinerja pada capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Gambar 2.11

Upaya Perbaikan Dalam Meningkatkan Nilai IKM




Sumber : Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

Setelah dilakukan analisis mendalam terhadap capaian nilai IKM, terdapat 1 (satu) urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah yang sangat penting untuk menjadi perhatian yaitu urusan keagamaan khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Meskipun urusan keagamaan merupakan urusan absolut pemerintah pusat, Kecamatan

Dayeuhkolot melalui sub kegiatan “Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal" dapat berkontribusi dan berperan aktif dalam mencegah konflik sosial dan membangun harmonisasi dalam hal keagamaan. Kecamatan Dayeuhkolot sebagai elemen pemerintahan terdekat dengan masyarakat dapat mendeteksi potensi konflik sejak dini karena perbedaan- perbedaan yang terdapat di masyarakat. Tidak hanya itu, Kecamatan Dayeuhkolot dapat memfasilitasi kegiatan keagamaan bersama seperti peringatan hari besar keagamaan, do'a bersama, atau kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan harmonisasi antar masyarakat beragama.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan diarahkan pada tahapan evaluasi dalam upaya menciptakan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat seiring dengan lahirnya paradigma new public services (NPS) yang telah menempatkan masyarakat selaku warga negara sebagai pemilik negara. Salah satu instrument yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi memberikan koreksi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi public adalah Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kegiatan Pengukuran IKM dalam pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot memiliki Program Inovasi diantaranya adalah

1. Program Simple Bedas ( Sistem Pelayanan Bisa Engke Datang Sore),
2. Program Gercep Surti (Gerakan Cepat Telesuri Stunting).

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja Yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Dayeuhkolot Pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Dayeuhkolot melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2021–2026. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), serta output dan outcome pembangunan yang menjadi tanggung jawa kecamatan.

Dengan penyajian hasil evaluasi yang terstruktur, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025– 2029, sehingga lebih adaptif terhadap tantangan, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

### 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

## 2.1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target IKK | Target Indikator Lainnya (SPM, dll) | Target Capaian Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Nilai AKIP | | | 65,00 | 71,00 | 72,00 | 77,00 | 78,00 | 65,66 | 76,05 | 78,50 | | | 101 % | 107% | 109% | | |
| 2 | Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik | | | 90 % | 90.05 % | 90.07% | 90.09% | 91% | 90% | 90.05% | 90.07% | | | | | | | |
| 3 | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketetuan dan tepat waktu | | | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | | | | 73% | | | |
| 4 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | - | - | 4 Dok | 4 Dok | Dok | | Dok | 3 Dok | | | - | - | 75% | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 2 Dok | | 2 Dok | 2 Dok | | 2 Dok | | 2 Dok | | | 50% | 75% | 50% | | |
| 6 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | | | 50% | 50% | 50% | | |
| 7 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dok | 1 Dok | 3 Dok | 1 Dok | | 1 Dok | 1 Dok | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 9 | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu | | | | 100 % | | 100% | | | 100% | | | | | | | | |
| 10 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | Org/ Bln | Org/ Bln | Org/B ln | Org/B ln | Org/B ln | Org/B ln | Org/B ln | Org/B ln | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 11 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 2 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 2 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 4 Lpr | 4 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | 2 Lpr | | | 100 % | 100% | 50% | | |
| 13 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 14 | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 0 | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 25% | 25% | 25% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | Paket | Paket | Paket | 1 Paket | Paket | 0,00 | Paket | Paket | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 18 | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | Dok | Dok | Dok | Dok | Dok | Dok | Dok | Dok | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 19 | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 20 | Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 22 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 1 Paket | 2 Paket | 2 Paket | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 23 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 24 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | 2 Paket | | 2 Paket | 2 Paket | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 25 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 26 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 50% | | |
| 28 | Persentase dokumen pelayanan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | Paket | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | | |
| 30 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka | | | Unit | Unit | | Unit | Unit | Unit | Unit | | | | | | | | |
| 31 | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 2 Jenis | 2 Jenis | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 4 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 34 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 4 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 4 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 35 | Persentase BMD dalam kondisi baik | | | 90% | 90.05 % | 90.07% | 90.09% | 91% | 90% | 90.05% | 90.07% | | | | | | | |
| 36 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 14 Unit | | 10 Unit | | | 14 Unit | | | | 75% | 75% | 100% | | |
| 37 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | Unit | Unit | 1 Unit | Unit | | Unit | Unit | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 38 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | | | | 100% | 100% | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | IKM | | | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 92,00 | 93,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4<br>1 | Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| 4<br>2 | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | 1 Lpr | | | | | | | | | | | |
| 4<br>3 | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 1 Dok | | | | | 1 Dok | | | | | 100 % | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan | | | | 100 % | | 100% | | | 100% | | | | | 100% | | | |
| 45 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | 1 Laporan | | | | | | | | | | | |
| 46 | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | | | | 100 % | | 100% | | | 100% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 50 | IKM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | 1 Lpr | | | | | | | | | | | |
| 53 | Jumlah Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | |
| 54 | Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | | Unit | Unit | 6 Unit | 1 Uni | 6 Unit | Unit | Unit | 6 Unit | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 57 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | Pokmas / Ormas | Pokmas / Ormas | Pokmas / Ormas | Pokmas/Ormas | | Pokmas / Ormas | Pokmas / Ormas | Pokmas / Ormas | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 58 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | | | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 59 | persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | Lembaga Kemasyarakatan | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 61 | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | | | | Unit | Unit | 1 Unit | Unit | | Unit | Unit | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 62 | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | I Lpr | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | I Lpr | | | | | | | | | | | |
| 64 | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| 65 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| 67 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| 68 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| 70 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| 72 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| 73 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |
| 74 | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | 50 Keluarga | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | IKM | | | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 92,00 | 93,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | | | | | | |
| 76 | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 100 % | | | | | 100% | | | | | | | |
| 77 | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | |
| 78 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 81 | IKM | | | 84,00 | 85,00 | 86,00 | 92,00 | 93,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 | | | | | | | |
| 82 | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100 % | | | | | 100% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | 300 Orang | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | | | Orang | Orang | Orang | Orang | | Orang | Orang | | | | | | |
| 85 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | 1 Keg | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Lpr | 1 Keg | 1 Lpr | 1 Lpr | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 86 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | | | 100 % | 100% | 100% | | |
| 88 | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | 50 Org | | | | 100% | 100% | | |
| 89 | Persentase Desa Beradministrasi Baik | | | 100 % | 100 % | - | - | - | 100 % | 100 % | - | | | | | | | |
| 90 | Jumlah Desa Cepat Berkembang | | | - | - | 1 Desa | 1 Desa | 1 Desa | - | - | 1 Desa | | | | | | | |
| 91 | Persentase desa yang dibina | | | | 100 % | | 100% | | | 100% | | | | | | | | |
| 92 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | 1 Dok | 1 Dok | 1 Lpr | 1 Lpr | | 1 Dok | 1 Dok | | | 100 % | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | 1 Dok | | 1 Lpr | 1 Lpr | | 1 Dok | | | | | 100% | | |
| 95 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | - | 1 Dok | | 1 Lpr | | - | 1 Dok | | | | | 100% | | |
| 96 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | 1 Dok | | 1 Lpr | | | 1 Dok | | | | | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | 1 Dok | 1 Lpr | Dok | | | Dok | | | | | 100% | | |
| 98 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

# Tabel 2.15

## Evalusasi Capaian Kinerja Dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | Rata- rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realisasi |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.845.343.500,00 | 6.512.154.696,00 | 7.271.638.608,00 | 6.505.080.492 | 6.952.493.474,80 | 6.103.973.354,00 | 5.909.086.261,00 | 6.562.665.384,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17% | 90,74% | 90,25% | 0,00% | 0,00% | 96,64% | 1,02 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 65.000.000,00 | 40.000.000,00 | 11.635.000,00 | 12.000.000 | 15.000.000,00 | 37.638.673,00 | 20.261.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57,91% | 50,65% | 85,09% | 0,00% | 0,00% | 94,76% | 0,64 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 0,00 | 10.000.000 | 0,00 | 2.876.554 | 0,00 | 0,00 | 9.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 90,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 55.000.000,00 | 10.000.000 | 3.965.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 31.026.589,00 | 9.180.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56,41% | 91,80% | 65,32% | 0,00% | 0,00% | 86,77% | 0,44 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 5.000.000,00 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 2.000.000 | 5.000.000,00 | 2.327.500,00 | 2.108.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,55% | 42,16% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,29 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | 5.000.000 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 | 0,00 | 3.773.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00 | 10.000.000 | 2.670.000 | 2.000.000 | 5.000.000,00 | 78<br>4.284.584,00 | 5.200.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69% | 52,00% | 86,52% | 0,00% | 0,00% | 95,29% | 0,81 |
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.712.145.000,00 | 5.401.244.738,00 | 5.792.469.976,00 | 5.451.407.692 | 6.081.693.474,80 | 5.035.594.904,00 | 4.972.349.053,00 | 5.188.532.910,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16% | 92,06% | 89,57% | 0,00% | 0,00% | 96,40% | 1,01 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.704.145.000 | 5.393.244.738 | 5.784.469.976 | 5.443.407.692 | 6.073.693.474,80 | 5.028.159.704,00 | 4.971.279.053,00 | 5.182.624.110,00 | 0,00 | 0,00 | 88,15% | 92,18% | 89,60% | 0,00% | 0,00% | 96,40% | 1,01 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 1.875.000,00 | 900.000,00 | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75% | 45,00% | 40,50% | 0,00% | 0,00% | 73,99% | 0,76 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 3.781.800,00 | 170.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55% | 4,25% | 78,75% | 0,00% | 0,00% | 92,35% | 0,94 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 1.778.400,00 | 0,00 | 1.948.800,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92% | 0,00% | 97,44% | 0,00% | 0,00% | 99,14% | 1,03 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | 5.960.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 5.960.000 | 0,00 | 3.000.000 | 0,00 | 79 0,00 | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4.080.000,00 | 7.088.480,00 | 18.125.940,00 | 19.080.000 | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 3.340.000,00 | 17.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,48% | 1,64 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 4.080.000,00 | 7.088.480 | 18.125.940 | 19.080.000 | 4.080.000,00 | 4.080.000,00 | 3.340.000,00 | 17.844.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 47,12% | 98,44% | 0,00% | 0,00% | 99,48% | 1,64 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 159.678.500 | 164.641.478,00 | 143.879.572,00 | 88.200.000 | 106.200.000,00 | 134.634.272,00 | 121.458.595,00 | 142.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32% | 73,77% | 99,28% | 0,00% | 0,00% | 99,76% | 1,02 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 1.941.600,00 | 1.988.800,00 | 1.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% | 99,44% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,01 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.362.000,00 | 97.891.478 | 97.245.940 | 33.200.000 | 33.200.000,00 | 52.327.500,00 | 67.673.250,00 | 96.700.200,00 | 0,00 | 0,00 | 77,68% | 69,13% | 99,44% | 0,00% | 0,00% | 99,81% | 1,23 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.995.000,00 | 1.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 99,75% | 87,15% | 0,00% | 0,00% | 95,52% | 0,96 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.000.000,00 | 11.000.000 | 5.064.000 | 3.000.000 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 8.853.122,00 | 5.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 80,48% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 600.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 57,69% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,00 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 41.960.000 | 27.210.000 | 21.160.000 | 31.960.000 | 31.960.000,00 | 41.960.000,00 | 27.200.000,00 | 21.145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 99,96% | 99,93% | 0,00% | 0,00% | 99,98% | 0,80 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39.316.500 | 23.500.000 | 15.369.632 | 15.000.000 | 30.000.000,00 | 29.365.172,00 | 13.148.423,00 | 15.153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,69% | 55,95% | 98,59% | 0,00% | 0,00% | 99,53% | 0,80 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 | 410.000.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.674.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 97,73% | 0,00 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.700.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,68% | 0,00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.974.226,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 94,83% | 0,00 |
| Pengadaan Mebel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 692.440.000,00 | 827.920.000,00 | 846.528.120,00 | 850.420.000 | 720.520.000,00 | 681.865.789,00 | 731.387.822,00 | 783.918.448,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | 88,34% | 92,60% | 0,00% | 0,00% | 97,47% | 1,05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 2.991.000,00 | 2.930.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% | 97,67% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 76.000.000,00 | 107.200.000 | 77.908.120 | 76.000.000 | 76.000.000,00 | 20.320.885,00 | 46.361.144,00 | 63.145.968,00 | 0,00 | 0,00 | 26,74% | 43,25% | 81,05% | 0,00% | 0,00% | 93,24% | 1,46 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 613.440.000,00 | 717.720.000 | 765.620.000 | 771.420.000 | 641.520.000,00 | 658.553.904,00 | 682.096.678,00 | 717.772.480,00 | 0,00 | 0,00 | 107,35% | 95,04% | 93,75% | 0,00% | 0,00% | 97,87% | 1,03 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 212.000.000,00 | 65.300.000,00 | 49.000.000,00 | 83.972.800 | 25.000.000,00 | 210.159.716,00 | 58.409.791,00 | 36.950.800,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% | 89,45% | 75,41% | 0,00% | 0,00% | 91,02% | 0,56 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000,00 | 10.250.000,00 | 44.000.000 | 68.000.000 | 20.000.000,00 | 18.965.153,00 | 5.606.700,00 | 32.120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% | 54,70% | 73,00% | 0,00% | 0,00% | 90,04% | 1,19 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.175.000,00 | 4.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 63,50% | 96,60% | 0,00% | 0,00% | 98,85% | 0,99 |
| Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 187.000.000 | 50.050.000 | 0,00 | 10.972.800 | 0,00 | 186.194.563,00 | 49.628.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 145.400.000,00 | 143.609.000,00 | 307.464.000,00 | 304.530.328 | 78.400.000,00 | 132.121.420,00 | 111.326.800,00 | 245.461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87% | 77,52% | 79,83% | 0,00% | 0,00% | 92,77% | 1,23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi Pe-nyelenggaraan Kegiatan Peme-rintahan di Tingkat Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.250.000 | 0,00 | 82<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Koordinasi/ Sinergi peren-canaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | 33.250.000 | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Penyelenggara-an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 18.400.000,00 | 11.469.000,00 | 17.125.000,00 | 64.256.128 | 18.400.000,00 | 16.141.420,00 | 11.469.000,00 | 17.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73% | 100,00% | 99,52% | 0,00% | 0,00% | 99,84% | 1,02 |
| Peningkatan Efektifitas Pe-laksanaan Pe-layanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 18.400.000,00 | 11.469.000 | 17.125.000 | 64.256.128 | 18.400.000,00 | 16.141.420,00 | 11.469.000,00 | 17.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73% | 100,00% | 99,52% | 0,00% | 0,00% | 99,84% | 1,02 |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.298.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 82,98% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.298.000,00 | 9.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 82,98% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,00 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 117.000.000,00 | 122.140.000,00 | 280.339.000,00 | 197.024.200 | 50.000.000,00 | 105.980.000,00 | 91.559.800,00 | 218.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% | 74,96% | 77,91% | 0,00% | 0,00% | 92,02% | 1,27 |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan | 117.000.000 | 122.140.000 | 280.339.000 | 197.024.200 | 50.000.000,00 | 105.980.000,00 | 91.559.800,00 | 218.419.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90,58% | 74,96% | 77,91% | 0,00% | 0,00% | 92,02% | 1,27 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.173.452.000,00 | 1.636.338.000,00 | 2.405.833.234,00 | 2.384.217.931 | 1.032.100.000,00 | 1.132.627.963,00 | 1.596.646.696,00 | 2.320.191.002,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52% | 97,57% | 96,44% | 0,00% | 0,00% | 98,80% | 1,27 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 32.000.000,00 | 10.000.000,00 | 32.000.000,00 | 20.250.000 | 32.000.000,00 | 25.625.000,00 | 10.000.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 80,08% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Peningkata partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 32.000.000,00 | 10.000.000 | 32.000.000,00 | 20.250.000 | 32.000.000,00 | 25.625.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,08% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | 4.000.000 | 78.686.000,00 | 19.961.673 | 0,00 | 84<br>0,00 | 0,00 | 70.865.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 96,57% | 0,00 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 1.107.852.000,00 | 1.593.000.000,00 | 2.267.954.234,00 | 2.352.867.931 | 966.500.000,00 | 1.087.393.013,00 | 1.558.382.696,00 | 2.216.490.002,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% | 97,83% | 97,73% | 0,00% | 0,00% | 99,24% | 1,27 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 37.500.000,00 | 75.000.000 | 22.500.000 | 37.500.000 | 37.500.000,00 | 34.710.000,00 | 74.567.180,00 | 21.499.200,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56% | 99,42% | 95,55% | 0,00% | 0,00% | 98,49% | 0,85 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraha n | 635.000.000 | 790.000.000 | 1.150.212.040 | 885.041.831 | 700.000.000,00 | 623.636.013,00 | 769.858.516,00 | 1.140.066.202,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% | 97,45% | 99,12% | 0,00% | 0,00% | 99,71% | 1,22 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 410.352.000 | 723.000.000 | 1.090.242.194 | 1.427.826.100 | 204.000.000,00 | 404.047.000,00 | 710.957.000,00 | 1.049.979.500,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | 98,33% | 96,31% | 0,00% | 0,00% | 98,75% | 1,37 |
| Evaluasi Kelurahan | 25.000.000,00 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.945.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 60,00% | 98,90% | 0,00% | 0,00% | 99,63% | 0,58 |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 33.600.000,00 | 33.338.000,00 | 105.879.000,00 | 11.100.000 | 33.600.000,00 | 19.609.950,00 | 28.264.000,00 | 103.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36% | 84,78% | 97,94% | 0,00% | 0,00% | 99,31% | 1,74 |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 33.600.000,00 | 33.338.000 | 105.879.000 | 11.100.000 | 33.600.000,00 | 19.609.950,00 | 28.264.000,00 | 103.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58,36% | 84,78% | 97,94% | 0,00% | 0,00% | 99,31% | 1,74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | 0,00 | 6.262.000 | 0,00 | 5.000.000 | 0,00 | 85 0,00 | 6.262.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 3.250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 |
| Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 0,00 | 0,00 | 28.702.000,00 | 3.250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.686.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,98% | 0,00 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 4.000.000,00 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 0,00 | 0,00 | 53.686.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.684.900,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 0,00 | 0,00 | 53.686.000 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.684.900,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 |
| Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.664.300 | 0,00 | 86<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.664.300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.260.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.343.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 21.920.000,00 | 36.188.000,00 | 43.965.000,00 | 21.920.000 | 21.920.000,00 | 21.630.000,00 | 21.603.000,00 | 43.900.600,00 | | | 98,68% | 59,70% | 99,85% | 0,00% | 0,00% | 99,95% | 1,27 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 21.920.000,00 | 36.188.000,00 | 43.965.000,00 | 21.920.000 | 21.920.000,00 | 21.630.000,00 | 21.603.000,00 | 43.900.600,00 | | | 98,68% | 59,70% | 99,85% | 0,00% | 0,00% | 99,95% | 1,27 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 21.920.000,00 | 22.938.000 | 21.920.000,00 | 21.920.000 | 21.920.000,00 | 21.630.000,00 | 21.603.000,00 | 21.917.600,00 | | | 98,68% | 94,18% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,00 |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0,00 | 8.000.000 | 22.045.000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.983.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 99,91% | 0,00 |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- | 0,00 | 5.250.000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | | | | | 89 | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 66.800.000,00 | 78.702.000,00 | 112.049.000,00 | 66.800.000 | 66.800.000,00 | 24.520.000,00 | 86.024.000,00 | 82.976.290,00 | | | 36,71% | 109,30% | 74,05% | 0,00% | 0,00% | 90,47% | 1,50 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 66.800.000,00 | 78.702.000,00 | 112.049.000,00 | 66.800.000 | 66.800.000,00 | 24.520.000,00 | 86.024.000,00 | 82.976.290,00 | | | 36,71% | 109,30% | 74,05% | 0,00% | 0,00% | 90,47% | 1,50 |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | 33.200.000,00 | 0,00 | 46.498.000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.496.800,00 | | | 0,00% | 0,00% | 110,75% | 0,00% | 0,00% | 103,46% | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 0,00 | 33.200.000,00 | 33.200.000,00 | 33.200.000 | 33.200.000,00 | 0,00 | 43.180.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #DIV/0! |
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 16.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000 | | | 12.130.000,00 | | 6.800.000,00 | | | 72,20% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,82 |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 32.000.000 | 25.551.000 | 16.800.000 | 16.800.000,00 | | 29.375.000,00 | 24.679.490,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 98,85% | 0,00 |
| Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 16.800.000,00 | 13.502.000 | - | 16.800.000 | 16.800.000,00 | 12.390.000,00 | 13.469.000,00 | 0,00 | | | 73,75% | 99,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 30.000.000,00 | 66.407.000,00 | 112.475.000,00 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 19.415.000,00 | 60.204.000,00 | 112.459.400,00 | | | 64,72% | 90,66% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 30.000.000,00 | 66.407.000,00 | 112.475.000,00 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 19.415.000,00 | 60.204.000,00 | 112.459.400,00 | | | 64,72% | 90,66% | 99,99% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,80 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10.000.000,00 | 22.938.000 | 55.475.000 | - | 0,00 | 10.000.000,00 | 22.938.000,00 | 55.475.000,00 | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,77 |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 0,00 | 11.469.000 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 11.469.000,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 9.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 94,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 25000000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.986.000,00 | | | 0,00% | 0,00% | 99,94% | 0,00% | 0,00% | 99,98% | 0,00 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0,00 | 32.000.000 | 32.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000,00 | 0,00 | 25.797.000,00 | 31.998.400,00 | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 |

Sumber : Hasil Olahan Kecamatan Dayeuhkolot

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

Kelompok sasaran layanan di Kecamatan Dayeuhkolot pada dasarnya adalah seluruh Aparatur Kecamatan (ASN dan Non ASN) serta warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kecamatan Dayeuhkoklot. Ini mencakup individu, keluarga, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan berbagai bentuk layanan administrasi, rekomendasi, atau fasilitasi dari pemerintah.

Warga datang untuk mengurus keperluan seperti pembuatan KTP, surat pindah, surat keterangan domisili, pengesahan dokumen, serta rekomendasi perizinan usaha kecil. Pelayanan ini penting untuk mendukung kepastian hukum, administrasi kependudukan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain warga perorangan, kelompok sasaran juga mencakup aparatur desa yang berada di Kecamatan Dayeuhkolot.

Camat bertugas membina dan mengawasi perangkat desa dan kelurahan dala penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat desa. Kecamatan juga sering kali memberikan pelayanan pendampingan teknis, bimbingan administrasi, serta fasilitasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat maupun daerah yang melibatkan desa dan kelurahan.

Kelompok sasaran lainnya adala lembaga kemasyarakatan seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, karang taruna, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang membutuhkan pembinaan, koordinasi, atau dukungan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan berperan sebagai penghubung antara lembaga-lembaga ini dengan pemerintah daerah, membantu mereka dalam mengakses program-program bantuan, pelatihan, hingga kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan demikian, layanan kecamatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi memperkuat kapasitas

sosial dan pembangunan komunitas lokal.

### 2.1.5 Mitra Kecamatan Dayeuhkolot dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kemitraan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas kecamatan, khususnya dalam pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif.

Adapun mitra Kecamatan Dayeuhkolot dalam pemberian Pelayanan yaitu:

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

   Sesuai dengan peta relasi dalam proses bisnis, kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh dinas dan badan di tingkat kabupaten dalam upaya melaksanakan tugas dan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui fasilitasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Instansi Vertikal

   Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

   - Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
   - Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah
   - Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
   - Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

3. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan, Kecamatan menjalin kemitraan

dengan desa guna penyampaian informasi terhadap masyarakat dan selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan tugas atributif untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terhadap Pemerintah Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Dayeuhkolot

### 2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah- langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, wilayah Pulau Jawa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat ekonomi nasional, Pulau Jawa memiliki beban yang kompleks, mulai dari inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi dalam industri, hingga ketimpangan infrastruktur dan kerentanan terhadap bencana.

Selain itu, permasalahan sosial seperti mismatch keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya angka

kemiskinan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan TBC juga menjadi isu yang harus segera

ditangani. Untuk itu, identifikasi isu prioritas dan strategis menjadi langkah penting dalam perumusan kebijakan yang efektif guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah- wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

- Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
- Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
- Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kecamatan Dayeuhkolot sebagai bagian dari Kabupaten Bandung turut merasakan tantangan pembangunan yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan Kesehatan. Keterbatasan konektivitas menyebabkan mobilitas penduduk antarwilayah menjadi kurang optimal, menghambat distribusi ekonomi lokal, serta memperlebar kesenjangan antara desa-desa di Kecamatan Dayeuhkolot dengan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lainnya.

Selain itu, layanan kesehatan yang belum merata dan fasilitas yang terbatas memperparah tantangan sosial di masyarakat. Kondisi ini secara keseluruhan berdampak pada

rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya daya saing lokal, dan terhambatnya percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Dayeuhkolot.

### 2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi pedoman bagi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Bupati Bandung terpilih, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bandung beberapa tahun terakhir, maka terdapat beberapa permasalahan pembangunan utama yang disertai tantangan di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Memadai

   Terkait Kualitas SDM, ada beberapa tantangan yang dihadapi Kabupaten Bandung, seperti dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.16
Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia

| Urutan Prioritas | Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia |
|---|---|
| 1. | Kualitas SDM yang belum memadai |
| 2. | Terbatasnya akses layanan pendidikan dan kesehatan |
| 3. | Masih adanya tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk isu stunting dan kekerasan terhadap perempuan dan Anak |
| 4. | Mengatasi ketimpangan pendapatan Masyarakat |
| 5. | Ketimpangan gender yang masih terjadi, terutama dalam akses ekonomi dan politik bagi perempuan |

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

2. Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi dan

Ketahanan Pangan

Tabel 2.17

Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

| Urutan Prioritas | Tantangan Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan |
|---|---|
| 1. | Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja |
| 2. | Pengoptimalan sektor pertanian dan jasa Kesehatan |
| 3. | Ketahanan pangan yang masih perlu ditingkatkan |
| 4. | Tingkat partisipasi angkatan kerja belum optimal, terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan penyandang disabilitas |
| 5. | Ketimpangan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi keluarga |
| 6. | Penguatan sektor unggulan salah satunya industri pengolahan |
| 7. | Penguatan sektor wisata |
| 8. | Kurangnya kolaborasi dan integrasi ekonomi untuk mendukung ekonomi kreatif |

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

3. Kendala dalam Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 2.18

Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

| Urutan Prioritas | Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah |
|---|---|
| 1. | Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat |
| 2. | Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan dalam rangka menghadapi *dynamic goverment* |
| 3. | Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil, dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem digital Pemerintahan |

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

### 4. Tantangan Infrastruktur dan Lingkungan

Tabel 2.19

Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

| Urutan Prioritas | Tantangan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan |
|---|---|
| 1 | Adanya degradasi lingkungan, akibat kurangnya pengendalian pemafaatan ruang, pencemaran lingkungan, deforestasi, dan pengelolaan sampah yang belum maksimal |
| 2 | Belum optimalnya pemerataan akses infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung |
| 3. | Belum optimalnya pembangunan wilayah, terutama dalam aspek infrastruktur, hunian, dan kualitas Lingkungan |

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

### 5. Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.20

Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum

| Urutan Prioritas | Tantangan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
|---|---|
| 1 | Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum yang perlu ditingkatkan |
| 2 | Koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan |
| 3 | Tantangan dalam menjagakerukunan umat Beragama |

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bandung yang dihadapi, terdapat beberapa tantangan pembangunan krusial yang perlu mendapatkan perhatian oleh Kecamatan Dayeuhkolot. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan keterampilan dan minimnya

fasilitas pendidikan non-formal menyebabkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal masih tertinggal. Tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan masih menghadapi kendala dalam hal digitalisasi layanan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta koordinasi lintas sektoral yang belum optimal. Pelayanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap

kebutuhan masyarakat, terutama administrasi kependudukan. Selain itu tantangan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, saluran drainase, dan sanitasi masih belum merata dan memadai, beberapa kelurahan/desa mengalami banjir lokal saat musim hujan karena sistem drainase yang buruk. Persampahan juga menjadi persoalan yang belum tertangani secara sistemik.

### 2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Dasar hukum yang menjadi landasan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044. Peraturan Daerah ini menetapkan arah kebijakan penataan ruang selama 20 tahun ke depan yang meliputi tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kecamatan Dayeuhkolot adalah salah satu kecamatan

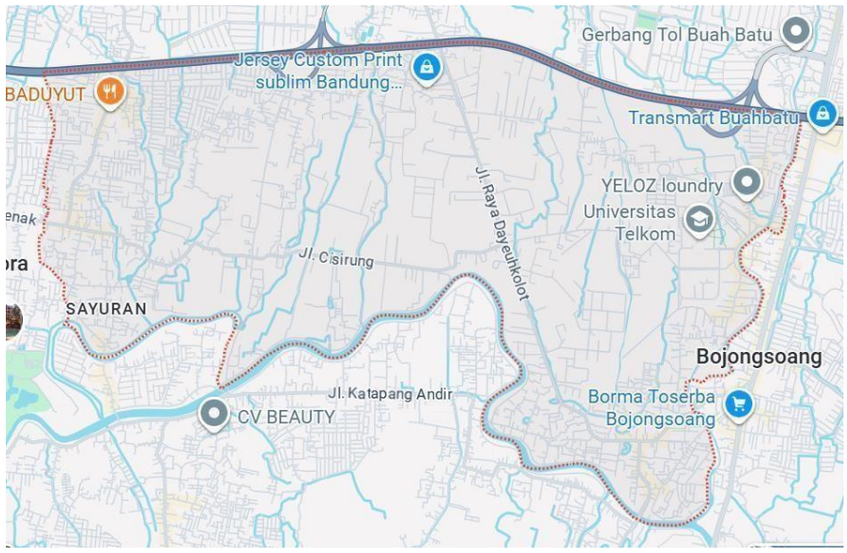
dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan, 15 Dusun, 87 RW dan 442 RT. Adapun batasan- batasan wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kota Bandung
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Baleendah

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Margahayu

Gambar 2.12.
Kondisi Geografis




Sumber data : Dayeuhkolot Dalam Angka 2020

Dayeuhkolot merupakan daerah rawan banjir di Bandung. Bersama dengan Baleendah, kecamatan ini menjadi daerah siaga bila musim penghujan tiba. Kajian karakter DAS Citarum (2011) mendapatkan bahwa 94% (sekitar 879,8 ha) wilayah Dayeuhkolot berpotensi terkena banjir setiap tahun. Wilayah ini termasuk DAS Citarum bagian hulu.

Karena letak geografis Dayeuhkolot dan Baleendah yang berdekatan (bahkan berbatasan) dengan Kota Bandung, maka dapat dipastikan jalur transportasi dari/ke Kota Bandung yang padat pun terputus selama banjir dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal inilah yang menjadi masalah bersama pemerintah Kabupaten dan Kota Bandung.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka

Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan

dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut:

Tabel 2.21

Telaahan RTRW dan KLHS Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

| No | Telaahan RTRW dan KLHS | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1.<br><br>2.<br><br><br><br><br><br>3. | Kecamatan Dayeuhkolot sebagai Pusat pelayanan lingkungan (PPL)<br><br>Wilayah Kecamatan berfungsi sebagai sentra industri, pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan, pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, pusat wisata alam dan budaya, pusat konservatif kehutanan, sentra pertanian dan Perkebunan<br><br>Kecamatan Dayeuhkolot termasuk kawasan rawan bencana puting beliung, banjir, longsor, dan kekeringan Kecamatan Dayeuhkolot termasuk Kawasan hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, Taman Wisata Alam, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Holtikultura, dan Kawasan Perkebunan | 1. Masih rendahnya Pengetahun dan wawasan masyarakat terhadap RTRW;<br><br>2. UMKM belum teroganisir dengan baik<br><br>3. Belum efektifnya pengelolaan sampah<br><br>4. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kependudukan<br><br>5. Belum Optimalnya Pengelolaan Objek Wisata | 1. Masih rendahnya Kesadaran dan Kepedulian terhadap Tata Kelola Lingkungan<br><br>2. Optimalisasi Pemerintah Desa terhadap Komitmen Lingkungan dan Tata Ruang Wilayah | 1. Alokasi APBD dalam DPA Kecamatan<br>2. Sumber daya Aparatur Kecamatan<br>3. Adanya potensi yang bisa dikelola<br>4. Adanya regulasi Pemerintah (Kewenangan, Tugas Pembantuan, aturan layanan publik) |

### 2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsipn pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melakukan kajian mengenai isu-isu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 3 isu PB strategi dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.22

Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

| No | Isu PB Prioritas Berdasarkan 203 Indikator | TPB yang mendukung PB |
|---|---|---|
| 1. | Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat | TPB 4 |
| 2. | Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD | TPB 16 |
| 3. | Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana | TPB 1 |

` Sumber: KLHS RPJMD 2025

Sebagai wilayah administratif yang terus mengalami perkembangan, Kecamatan Dayeuhkolot memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Kecamatan Dayeuhkolot berkomitmen untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) melalui pendekatan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya, keadilan sosial, serta ketahanan wilayah dalam jangka panjang.

### 2.2.5 Permasalahan pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu pelayanan kepada masyarakat baik berkaitan dengan pelayanan, tugas umum pemerintahan dan tata

kelola pemerintahan yang baik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi, yaitu:

a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai

Secara kuantitatif, jumlah aparatur yang tersedia saat ini belum sebanding dengan beban kerja yang semakin kompleks, seiring dengan peningkatan tuntutan pelayanan masyarakat dan dinamika kebijakan pemerintah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program kerja dan keterlambatan dalam proses pelayanan administratif. Dari sisi kualitas, sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan, baik dari aspek pendidikan formal maupun keterampilan teknis.

b. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan kinerja, selain itu proses pelaporan dan evaluasi kinerja aparatur sering kali belum konsisten dan belum digunakan

secara maksimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis secara berkala, juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan sistem ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

c. Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus strategis dalam upaya

mewujudkan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Meskipun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat setiap tahun, perlu upaya peningkatan kualitas agar kepuasan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib

Permasalahan yang muncul di antaranya adalah masih lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, seperti penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan laporan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisas kegiatan, serta kurang lengkapnya bukti administrasi keuangan. Kecamatan Dayeuhkolot sebagai pembina tingkat kecamatan perlu lebih meningkatkan pembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

e. Terdapat wilayah dengan kerawanan banjir, dan permasalahan sampah liar

Kecamatan Dayeuhkolot menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu wilayah dengan kerawanan longsor, banjir, serta permasalahan sampah liar yang belum tertangani secara optimal.

Tabel 2.23
Pemetaan Masalah

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal | Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai | Jumlah aparatur terbatas |
| | | | Rekrutmen pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan |
| | | | Kompetensi teknis dan manajerial belum merata |
| | | Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan | Pemahaman aparatur kecamatan terhadap konsep akuntabilitas kinerja masih terbatas |
| | | | Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam penyusunan, pengukuran, dan pelaporan kinerja |
| | | | Minimnya pendampingan/assistensi dari instansi pembina dalam penerapan SAKIP di tingkat kecamatan |
| | | Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan | Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas |
| | | | Inovasi pelayanan masih rendah |
| | | | Belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) |
| | | Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib | Kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas |
| | | Terdapat wilayah dengan kerawanan banjir, dan permasalahan sampah liar | Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah |
| | | | Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya |

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

### 2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.

Penentuan isu strategis dalam Renstra Kecamatan Dayeuhkolot tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan. Proses ini mencakup analisis terhadap

faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan dan program pembangunan. Faktor internal meliputi potensi dan permasalahan pada bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan, sedangkan faktor eksternal mencakup kebijakan nasional, dinamika global, serta perkembangan sosial dan ekonomi di tingkat regional.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, isu strategis yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan program pembangunan. Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam melaksanakan fugas pokok dan fungsi kecamatan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.24
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Dayeuhkolot

| Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD | Permasalahan | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | Isu Strategis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Regional | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
| Pelayanan publik tingkat dasar | Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai | Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) | Transformasi Digital | Bonus demografi | Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Optimalisasi kualitas dan Kuantitas sumber daya Manusia aparatur untuk Mendukung peningkatan Kinerja pelayanan publik |
| | Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja kecamatan yang masih perlu ditingkatkan | Sinkronisasi program antar OPD belum baik | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan akibat kurangnya keselarasan program antar OPD | Desentralisasi dan otonomi daerah | Kualitas tata kelola pemerintahan | Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan |
| | Kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan | Transformasi Digital | Desentralisasi dan otonomi daerah | Kualitas tata Kelola pemerintahan | Peningkatan mutu dan Konsistensi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel |
| | Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib | Belum optimalnya tata kelola pemerintahan | Transformasi Digital | Desentralisasi dan otonomi daerah | Kualitas tata Kelola pemerintahan | Peningkatan efektivitas Pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan |
| | Terdapat wilayah dengan kerawanan banjir, dan permasalahan sampah liar | Belum optimalnya Penanganan tanggap Darurat bencana | Perubahan Iklim | Perubahan iklim, data dukung dan daya tampung lngkungan, serta ketahanan bencana | Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | Peningkatan penanganan Permasalahan sampah dan pengendalian risiko bencana lingkungan di wilayah kecamatan |

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dayeuhkolot untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dayeuhkolot yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan arah strategis yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan kerangka kinerja Kecamatan Dayeuhkolot dalam kurun waktu lima tahun. Penetapan tujuan dan sasaran dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah pembangunan serta memastikan konsistensi antara kebijakan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.

### 3.1.1. Tujuan

Tujuan Kecamatan Dayeuhkolot dalam Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, khususnya misi ketiga yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.” Penetapan tujuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dayeuhkolot selama periode lima tahun ke depan.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Dayeuhkolot adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.” Peningkatan kualitas pelayanan publik dimaknai sebagai suatu proses

berkesinambungan yang melibatkan perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta

penguatan mekanisme pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Untuk mengukur pencapaian tujuan ini, digunakan indikator tujuan yaitu “Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, indikator tersebut sekaligus menjadi instrumen evaluasi yang objektif bagi Kecamatan Dayeuhkolot dalam melaksanakan perbaikan dan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

### 3.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot dirumuskan dengan mengacu pada masing-masing urusan yang menjadi tanggungjawab kecamatan. Salah satu sasaran utama yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Sasaran ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berperan sebagai indikator *intermediate outcome* berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penetapan sasaran ini berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dengan mengukur IKM, Kecamatan Dayeuhkolot dapat menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat, sekaligus menjadi acuan dalam merancang program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, sasaran ini tidak hanya mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan publik, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0.26 | 0,27 | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | Nilai IKM | 91,88 | 92,09 | 92,31 | 92,54 | 92,78 | 93,03 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017 |

Sumber data : Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

## 3.2 Strategi Kecamatan Dayeuhkolot dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025- 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Kecamatan Dayeuhkolot menetapkan strategi dan arah kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik. Fokus ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Kecamatan Dayeuhkolot berperan sebagai unit pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diambil diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Arah kebijakan ini mencakup penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, serta percepatan penanganan aspirasi masyarakat melalui sistem layanan terpadu. Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pelayanan prima dan inovatif, Kecamatan Dayeuhkolot bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengarahkan pencapaian tersebut, strategi pembangunan dibagi ke dalam lima tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 3.2. Penahapan Kecamatan Dayeuhkolot

| Tahap I (2026) | Tahap II (2027) | Tahap III (2028) | Tahap IV (2029) | Tahap V (2030) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat | Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital | Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital | Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital | Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan |
| Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal | Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal | Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor | Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi | Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan |

Sumber data : Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

## 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Dayeuhkolot dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Dayeuhkolot dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Dayeuhkolot menyusun arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029. Penyusunan arah kebijakan ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan kabupaten. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Dayeuhkolot diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan Kecamatan Dayeuhkolot difokuskan pada peningkatan kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip good governance serta peningkatan kapasitas aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi penting agar penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan serta tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang profesional. Selain itu, Kecamatan Dayeuhkolot juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Pelayanan publik diarahkan agar lebih responsif, cepat, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kinerja aparatur, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi

lokal menjadi bagian penting dalam arah kebijakan Renstra Kecamatan

Dayeuhkolot. Melalui penguatan partisipasi masyarakat, potensi ekonomi, sosial, dan budaya lokal dapat dioptimalkan sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, pembangunan di Kecamatan Dayeuhkolot diharapkan tidak hanya terfokus pada birokrasi dan pelayanan, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Berikut ini disajikan tabel Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot sebagai berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Dayeuhkolot

| NO | OPERASIONALISASI NSPK | ARAH KEBIJAKAN RPJMD | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD | KET. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | -5 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan berbasis potensi lokal | Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan | |

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

# BAB IV
# PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot menyusun program-program pembangunan yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Program- program ini dilengkapi dengan indikator keluaran yang jelas dan terukur, sehingga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terarah. Setiap kegiatan dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan Kecamatan Dayeuhkolot selama periode 2025–2029 disajikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | Indikator | PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat | | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya. |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan | | | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017 |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah | | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah<br>2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah oleh Tim Evaluator Indeks reformasi birokrasi, '- Hasil penilaian evaluasi manajemen resiko oleh Inspektorat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat |
| | | | | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD |
| | | | | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusun nya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan/jumla h dokumen administrasi keuangan yang harus disusun x 199% |
| | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | | | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | | | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan/jumla h dokumen administrasi BMD yang harus disusun x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | | | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu | Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan/jumla h dokumen administrasi kepegawaian yang harus disusun x 100% |
| | | | | Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |
| | | | | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x 100% |
| | | | | Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| | | | | Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | | | | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| | | | | Terpeliharanya Barang Milik Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset Barang Milik Daerah x 100% |
| | | | | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |
| | | | Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan kepala daerah | | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari kepala daerah kepala camat | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan : jumlah urusan pemerintahan yang direncanakan x 100% |
| | | | | | Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| | | | | Terselengaranya urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan | Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan da pemberdayaan masyarakat | | Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina / Jumlah Keseluruhan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan x 100% |
| | | | | Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100% |
| | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | | Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah pemberdayaan kelurahan terfasilitasi dan terbina yang direncanakan x 100% |
| | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
| | | | | Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| | | | | Terlaksananya Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan |
| | | | | | persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya |
| | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
| | | | | Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
| | | | | Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaanPembe rdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara |
| | | | Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan peraturan daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentraman dan tertib | | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100% |
| | | | | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Teraksananya Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| | | | | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| | | | Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan | | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 112<br><br>Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemelihara-an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
| | | | | Terlaksananya penangganan Konflik Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
| | | | | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
| | | | Meningkatnya kinerja penyelenggraan pemerintahan desa melalui pembinaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan | | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa/jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 114 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasaan desa | Persentase desa yang dibina dan diawasi | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina dan diawasi/total jumlah desa x 100% |
| | | | | Terlaksananya memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| | | | | Terlaksananya memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| | | | | Terlaksananya memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
| | | | | Teraksananya memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarata n Desa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
| | | | | Terlaksananya memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

## Tabel 4.2
## Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

| Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Baseline 2024 | | PAGU INDIKATIF | | | | | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | |
| KECAMATAN DAYEUHKOLOT | | | 9.983.369.842 | | 9.461.522.588 | | 9.376.523.400 | | 9.453.949.000 | | 9.493.130.100 | | 9.642.290.340 | |
| UNSUR KEWILAYAHAN | | | 9.983.369.842 | | 9.461.522.588 | | 9.376.523.400 | | 9.453.949.000 | | 9.493.130.100 | | 9.642.290.340 | |
| KECAMATAN | | | 9.983.369.842 | | 9.461.522.588 | | 9.376.523.400 | | 9.453.949.000 | | 9.493.130.100 | | 9.642.290.340 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah<br>2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah | | 6.861.638.608 | 51,1055 | 6.709.387.000 | 51,2055,10 | 6.609.387.000 | 51,3055.20 | 6.609.387.000 | 51,4055,30 | 6.609.387.000 | 51,5055,30 | 6.609.387.000 | 5.3.1 |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 100 | 11.635.000 | 79 | 20.000.000 | 85 | 20.000.000 | 88 | 20.000.000 | 90 | 20.000.000 | 95 | 20.000.000 | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | 0 | 4 | 10.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | 3.965.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 5.000.000 | 4 | 0 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 2.670.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | | | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu | 100 | 5.792.469.976 | 100 | 5.698.337.000 | 100 | 5.698.337.000 | 100 | 5.698.337.000 | 100 | 5.698.337.000 | 100 | 5.698.337.000 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Orang/bulan | 5.784.469.976 | 2.012 | 5.690.337.000 | 2.012 | 5.690.337.000 | 2.012 | 5.690.337.000 | 2.012 | 5.690.337.000 | 2.012 | 5.690.337.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Se m esteran SKPD | 4 Laporan | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan | -100 | 0 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | 100 | 3.000.000 | |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu | 100 | 18.125.940 | 100 | 21.080.000 | 100 | 4.080.000 | 100 | 4.080.000 | 100 | 4.080.000 | 100 | 4.080.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 0 | 0 | 17.000.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 25 Orang | 18.125.940 | 25 | 4.080.000 | 25 | 4.080.000 | 25 | 4.080.000 | 25 | 4.080.000 | 25 | 4.080.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor | 100 | 143.879.572 | 100 | 176.450.000 | 100 | 93.450.000 | 100 | 93.450.000 | 100 | 93.450.000 | 100 | 93.450.000 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 97.245.940 | 2 | 118.450.000 | 2 | 38.450.000 | 2 | 38.450.000 | 2 | 38.450.000 | 2 | 38.450.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 5.064.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.000.000 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 21.160.000 | 1 | 31.960.000 | 1 | 31.960.000 | 1 | 31.960.000 | 1 | 31.960.000 | 1 | 31.960.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 15.369.632 | 1 | 18.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah | 100 | 846.528.120 | 100 | 765.520.000 | 100 | 765.520.000 | 100 | 765.520.000 | 100 | 765.520.000 | 100 | 765.520.000 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 77.908.120 | 1 | 68.181.180 | 1 | 68.181.180 | 1 | 68.181.180 | 1 | 68.181.180 | 1 | 68.181.180 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 765.620.000 | 1 | 694.338.820 | 1 | 694.338.820 | 1 | 694.338.820 | 1 | 694.338.820 | 1 | 694.338.820 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam kondisi baik | 100 | 49.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 44.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat | | 307.464.000 | 92 | 147.665.588 | 92 | 100.680.000 | 92 | 333.492.000 | 92 | 372.673.100 | 92 | 521.833.340 | 5.3.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan | | 17.125.000 | 100 | 18.400.000 | 100 | 18.400.000 | 100 | 18.400.000 | 100 | 18.400.000 | 100 | 18.400.000 | |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 17.125.000 | 1 | 18.400.000 | 1 | 18.400.000 | 1 | 18.400.000 | 1 | 18.400.000 | 1 | 18.400.000 | |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum | 100 | 10.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan | 100 | 280.339.000 | 100 | 109.265.588 | 100 | 72.280.000 | 100 | 305.092.000 | 100 | 344.273.100 | 100 | 493.433.340 | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 280.339.000 | 4 | 109.265.588 | 4 | 72.280.000 | 4 | 305.092.000 | 4 | 344.273.100 | 4 | 493.433.340 | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina | | 2.569.907.234 | 92 | 2.445.350.000 | 92 | 2.375.350.000 | 92 | 2.375.350.000 | 92 | 2.375.350.000 | 92 | 2.375.350.000 | S.3.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 100 | 78.686.000 | 100 | 62.000.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.000.000 | 100 | 42.000.000 | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 0 | 1 | 32.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 32.000.000 | 1 | 32.000.000 | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan | 78.686.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan | 100 | 2.267.954.234 | 100 | 2.259.750.000 | 100 | 2.259.750.000 | 100 | 2.259.750.000 | 100 | 2.259.750.000 | 100 | 2.259.750.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 22.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Unit | 1.150.212.040 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas | 1.090.242.194 | 1 | 1.517.250.000 | 1 | 1.517.250.000 | 1 | 1.517.250.000 | 1 | 1.517.250.000 | 1 | 1.517.250.000 | |
| Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan | 0 Laporan | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi | 100 | 169.581.000 | 100 | 103.600.000 | 100 | 53.600.000 | 100 | 53.600.000 | 100 | 53.600.000 | 100 | 53.600.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 105.879.000 | 1 | 63.600.000 | 1 | 23.600.000 | 1 | 23.600.000 | 1 | 23.600.000 | 1 | 23.600.000 | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 0 Unit | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 0 Laporan | 35.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | |
| Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 1 Laporan | 28.702.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | 53.686.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | |
| Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara | 0 Keluarga | 53.686.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | 50 | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum | | 43.965.000 | 92 | 20.920.000 | 92 | 20.920.000 | 92 | 20.920.000 | 92 | 20.920.000 | 92 | 20.920.000 | S.3.1 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 | 43.965.000 | 100 | 20.920.000 | 100 | 20.920.000 | 100 | 20.920.000 | 100 | 20.920.000 | 100 | 20.920.000 | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Lapo ran | 21.920.000 | 1 | 10.920.000 | 1 | 10.920.000 | 1 | 10.920.000 | 1 | 10.920.000 | 1 | 10.920.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 1 Laporan | 22.045.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | - | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | - | 87.920.000 | 92 | 98.200.000 | 92 | 74.800.000 | 92 | 74.800.000 | 92 | 74.800.000 | 92 | 74.800.000 | S.3.1 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | 87.920.000 | 100 | 98.200.000 | 100 | 74.800.000 | 100 | 74.800.000 | 100 | 74.800.000 | 100 | 74.800.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 300 Orang | 51.669.000 | 300 | 51.575.000 | 300 | 28.175.000 | 300 | 28.175.000 | 300 | 28.175.000 | 300 | 28.175.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 50 Orang | 6.800.000 | 50 | 16.800.000 | 50 | 16.800.000 | 50 | 16.800.000 | 50 | 16.800.000 | 50 | 16.800.000 | |
| Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | 0 Orang | 3.900.000 | | | | | | | | | | | |
| Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0 Laporan | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 0 Dokumen | 25.551.000 | 1 | 29.825.000 | 1 | 29.825.000 | 1 | 29.825.000 | 1 | 29.825.000 | 1 | 29.825.000 | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa<br><br>Saran:<br>Rata-rata nilai evaluasi perkembangan desa dari seluruh desa di wilayah Kecamatan pada Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan (pelaksanaan monev sesuai dengan permendagri 72 dengan perbup oleh dpmd berbeda) | 100<br><br>- | 112.475.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 195.386.400 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | S.3.1 |
| Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang | 100 | 112.475.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 195.386.400 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 0 Dokumen | 55.475.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.386.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | - | 0 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 0 Dokumen | 32.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 Dokumen | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

## 4.2. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot berkomitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan dan kegiatan pembangunan dengan Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis, kecamatan berperan penting sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya. Dengan posisi tersebut, Kecamatan Dayeuhkolot tidak hanya menjadi simpul koordinasi pemerintahan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelaksanaan misi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan kewenangan yang dilimpahkan, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, setiap program prioritas yang dilaksanakan di tingkat kecamatan diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat.

Selain itu, Kecamatan Dayeuhkolot juga berperan dalam mendorong sinergi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta

unsur masyarakat lainnya agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui berbagai program prioritas, Kecamatan Dayeuhkolot berupaya menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dengan landasan tersebut, program prioritas yang diampu oleh Kecamatan Dayeuhkolot kemudian dijabarkan ke dalam outcome dan subkegiatan yang terukur. Seluruh program ini didesain tidak hanya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, melainkan juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, memperkokoh wawasan kebangsaan, serta memastikan keterpaduan antara pembangunan daerah dan pembangunan desa. Keseluruhan program prioritas beserta outcome dan subkegiatan yang mendukungnya digambarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Program Prioritas | Outcome | Subkegiatan | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | |
| 3 | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | |
| 3 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | |
| | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | |

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

## 4.3. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Kecamatan Dayeuhkolot telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan

Dayeuhkolot. Indikator kinerja Utama atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing- masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator Kinerja Kecamatan Dayeuhkolot yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Dayeuhkolot dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dayeuhkolot

| No. | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) | Persen | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | Persentase dari selisih nilai IKM d kecamatan antara tahu berjalan dengan tah sebelumny dibandingk dengan nilai IKM tahun sebelumny |

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025

4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui IKK sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Kecamatan Dayeuhkolot menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penetapan IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dapat terukur dan terarah, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui indikator yang jelas, pemerintah kecamatan berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat kecamatan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun sikap aparatur dalam melaksanakan tugasnya. IKM menjadi barometer yang relevan untuk menilai efektivitas pelayanan publik serta menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi IKM dilakukan secara periodik setiap tahun selama periode perencanaan 2025–2029, sehingga pemerintah kecamatan dapat mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan berkelanjutan, sekaligus memperkuat praktik-praktik pelayanan yang sudah berjalan baik.

Adapun proyeksi dan capaian target Laju Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot selama periode perencanaan ditetapkan secara bertahap untuk mencerminkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Target tersebut disajikan dalam Tabel 4.5

sebagai acuan dalam mengukur kinerja sekaligus arah pembangunan pelayanan publik kecamatan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

| No | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) | Persen | 0.19 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya |

Sumber:Hasil Analisis Kecamatan Dayeuhkolot, 2025

# BAB IV
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025–2029 merupakan wujud perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kecamatan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dayeuhkolot sebagai perangkat daerah kewilayahan, dengan tetap mengacu pada arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Dayeuhkolot menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Melalui dokumen ini, arah kebijakan, strategi, program, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan dapat terukur secara sistematis, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, terintegrasi, dan akuntabel.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Dayeuhkolot untuk berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Dayeuhkolot 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen strategis yang menjembatani kebijakan daerah dengan implementasi nyata di lapangan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Dayeuhkolot dapat semakin efektif, transparan, dan responsif, serta mampu mewujudkan

sasaran pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai dasar operasional terbaru dalam penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu, Renstra Kecamatan Dayeuhkolot juga disusun berdasarkan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025– 2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan di tingkat kecamatan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, sehingga pelaksanaan program dan kegiata kecamatan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, penetapan program, hingga uraian indikator kinerja dan target yang terukur. Proses penyusunan juga memperhatikan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis data, sehingga dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang sahih dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian, kaidah pelaksanaan penyusunan

Renstra Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025–2029 tidak hanya menekankan pada pemenuhan aspek regulatif sebagaimana diatur dalam peraturan dan instruksi menteri, tetapi juga pada integrasi dan sinkronisasi kebijakan, agar dokumen Renstra benar-benar mampu menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

## 5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Di tingkat kecamatan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dilakukan melalui mekanisme pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan capaian output. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan bertanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah yang dilaksanakan di wilayahnya berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah disepakati.

Evaluasi pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, evaluasi ini mencakup evaluasi internal oleh kecamatan dan masukan dari pemangku kepentingan, serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKIP).

Melalui pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, kecamatan dapat mengambil langkah korektif dan perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan kualitas perencanaan di tahun- tahun berikutnya, hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan efektivitas pembangunan wilayah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Aparatur Kecamatan Dayeuhkolot dalam rangka melaksakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan serta dituntut memiliki karakter dan sifat Tangguh Adaptif, Inovatif, dan Kreatif. Selain itu menjadi sebuah komitmen bahwa dokumen ini harus menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Soreang, September 2025

CAMAT DAYEUHKOLOT

ttd

ASEP SURYADI

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2 Komposisi Tingkat Pendidikan Sesuai Jenis Kelamin Tahun 2025
Tabel 2.3 Komposisi Golongan Sesuai Jenis Kelamin
Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Tabel 2.5 Daftar Pegawai Kelurahan Pasawahan
Tabel 2.6 Saldo Akhir Berdasarkan Jenis Aset
Tabel 2.7 Sarana Dan Prasarana Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025
Tabel 2.8 Kondisi Geografis Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2025
Table 2.9 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Nilai IKM Tahun 2024
Tabel 2.10 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Nilai IKM Tahun 2024
Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Capaian Tujuan dan Sasaran Kec amatan Dayeuhkolot Tahun 2021-2026
Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra
Tabel 2.13 Evaluasi Capaian Kinerja Dan Realisasi Pelayanan Kecamatan Dayeuhkolot
Tabel 2.14 Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Tabel 2.15 Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Tabel 2.16 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah
Tabel 2.17 Tantangan Pembangunan Infrastuktur Dan Lingkungan
Tabel 2.18 Tantangan Pembangunan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Tabel 2.19 Telaahan RTRW dan KLHS Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
Tabel 2.20 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung
Tabel 2.21 Pemetaan Masalah
Tabel 2.22 Teknik Menyimpulkan Isu Startegis Kecamatan Dayeuhkolot
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran RenstraPD
Tabel 3.2 Penahapan Kecamatan Dayeuhkolot
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Dayeuhkolot
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Dayeuhkolot

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Renstra PD
Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan
Gambar 2.2 Peta Kecamatan
Gambar 2.3 Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Standar Nasional
Gambar 2.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Nilai IKM Tahun 2024
Gambar 2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai IKM Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Renstra 2021-2026
Gambar 2.7 Perbandingan realisasi IKM Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2021-2026
Gambar 2.8 Perbandingan Realisasi Nilai IKM Tahun 2024 dengan Rata-rata Nilai IKM Nasional
Gambar 2.9 Faktor-faktor pendorong keberhasilan capaian peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Dayeuholot Tahun 2024
Gambar 2.10 Kinerja Operasional Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Publik
Gambar 2.11 Upaya Perbaikan Dalam Meningkatkan Nilai IKM
Gambar 2.12 Kondisi Geografis